

# Perkembangan Politik dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua: Perspektif Internasional\*

Juwono SUDARSONO

## Kerangka Acuan

**T**ELAAH ini dimulai dengan kecenderungan politik internasional pada tingkat internasional dan regional, dilanjutkan dengan perkiraan dampaknya terhadap perkembangan politik nasional.

Sekaliam telaah yang dikemukakan didasarkan pada asumsi bahwa apa yang disebut sebagai *globalisasi* kehidupan politik, ekonomi dan keamanan internasional pada satu sisi mengandung peluang dan harapan; pada sisi lain, ia juga mengundang tantangan, kendala dan ancaman. Dalam dunia yang semakin bercirikan persaingan keras di bidang ilmu, teknologi dan ekonomi, faktor-faktor politik tidak akan surut. Bahkan dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang, diperkirakan bandul ke arah mengerasnya per-

saingan politik dan ideologi justru akan tampil kembali.

Menghadapi itu semua, persatuan dan kesatuan nasional Indonesia merupakan kerja yang terus-menerus antar generasi dan sekali-sekali tidak boleh dipandang sebagai hal yang sudah mantap atau selesai.

## Perkembangan Internasional 25 Tahun Mendatang

Kecenderungan yang berlangsung sejak 5 tahun yang lalu diperkirakan akan terus berjalan selama 5-10 tahun mendatang. Untuk jangka waktu tersebut, Amerika Serikat maupun Uni Soviet tetap akan melakukan perubahan-perubahan struktural dalam perekonomiannya masing-masing dengan antara lain mengurangi anggaran belanja pertahanan keamanan. Kedua adidaya diperkirakan akan melanjutkan usahanya masing-masing maupun usaha-usaha bersama untuk mengurangi persenjataan nuklir strategis, persenjataan dan kekuatan personel konvensional dan mengukuhkan suatu perumusan

\*Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPHS), tanggal 16-21 Juli 1990 di Yogyakarta.

tentang Eropa yang bersatu, damai dan stabil.

Fungsi Masyarakat Eropa, Pakta Pertahanan NATO dan Pakta Warsawa serta forum pembinaan saling mempercayai di daratan Eropa akan terus disesuaikan dalam usaha menangani perubahan iklim politik dari perang dingin (atau Perang Dingin II 1981-1985) ke arah persaingan damai berkelanjutan menuju kerjasama yang langgeng. Bahasa politik dari generasi yang akan datang beralih dari *cold war/containment* dan *regional conflict* menjadi *peaceful sustained competition* menuju *enduring cooperation*.

Dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang, kekuatan-kekuatan yang selang 15 tahun terakhir telah berangsur-angsur meningkat, yakni Jerman dan Jepang, bukan saja akan keluar dari perlindungan ekonomi Amerika Serikat secara penuh, melainkan juga mengukuhkan dirinya masing-masing sebagai pusat-pusat pengaruh politik. Kawasan Pasifik dan Eropa selama 5-10 tahun mendatang akan semakin dihadapi dengan peran politik Jerman bersatu dan Jepang yang semakin menegaskan diri sebagai kutub dunia yang diperhitungkan. Perdebatan selama Perang Dunia II tentang mana yang lebih penting (Eropa atau Pasifik) muncul kembali dalam lingkup dan corak yang baru. Peran baru Jepang dan Jerman itu besar kemungkinan harus tercermin dalam *restrukturisasi* Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam mana kedua negara harus memainkan peran formal yang lebih nyata daripada yang selama ini dimainkan masing-masing. Di dalam PBB yang dirombak itu, ada peluang-peluang untuk negara-negara sedang berkembang untuk mengikhtikarkan agar PBB yang diperbarui itu mencerminkan usaha konkret ke arah demokratisasi hubungan internasional.

Baik Jepang maupun Jerman sudah lama mempersiapkan para diplomatnya agar peran politik kedua negara pada masa-masa mendatang sungguh-sungguh dapat diperjuangkan secara trampil oleh wakil-wakilnya di bidang diplomasi. Bersamaan dengan itu diperkirakan bahwa selama 5-10 tahun mendatang, diplomasi kebudayaan Jepang dan Jerman (melalui pameran buku, pertukaran budaya, program olahraga, pertunjukan film; dan lain sebagainya) akan mengalami kebangkitan. Kemajuan teknologi dan perekonomian kedua negara mau tidak mau dibarengi dengan penyebaran isi budaya, termasuk budaya populer melalui media massa.

Sejauh kebudayaan merupakan ujung tombak dari kekuatan politik dalam artian pengaruh, maka tatanan internasional di masa-masa mendatang tidak lagi didominasi oleh budaya ekonomi dan budaya manajemen perusahaan Amerika. Kesepadanan antara ketrampilan diplomasi dengan kekuatan ekonomi merupakan salah satu perkembangan politik internasional yang perlu dikaji, khususnya yang menyangkut peran Jepang dan Jerman.

Apabila kebangkitan Jepang dan Jerman menjadi kekuatan ekonomi dan politik merupakan kecenderungan jangka panjang yang mewarnai situasi internasional, maka corak dari pengaruh kebangkitan kedua negara itu masih belum tampak. Apabila Inggris pada abad ke-19 memperkenalkan kepada dunia konsep *industrialisasi* dan Amerika Serikat memperkenalkan konsep *kebebasan*, dapatkah Jepang dan Jerman menunjukkan kepada dunia suatu konsep yang utuh tentang kelangsungan hidup di bumi?

Penyatuan kembali Jerman telah mengubah peta politik Eropa, bahkan peta politik seluruh dunia. Terpelung pada anggota ma-

syarakat internasional lainnya, apakah Jerman dapat berangsur-angsur diajak untuk menjadi salah satu dari beberapa negara besar dunia yang sanggup mengelola proses politik internasional yang lebih mantap.

Makin meningkatnya peran Jepang dalam pencatutan politik dan ekonomi internasional untuk sebagian telah menggeser peran Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Bahkan sifat dan corak perekonomian Jepang telah berkembang sedemikian rupa sehingga seluruh tubuh politik Amerika Serikat makin merasakan gigitannya: defisit anggaran belanja dan perdagangan, peningkatan investasi Jepang di Amerika Serikat, keterkaitan erat proses produksi dan distribusi beberapa barang konsumen penting.

Oleh karena itu, selama 10-15 tahun mendatang, sebagian besar "aturan permainan" internasional yang selama ini dipancarkan oleh Amerika Serikat - Inggris sejak 1944 akan semakin luas dan longgar. Pengelompokan seperti G-7 dan forum-forum tandingan seperti G-15 dan G-77 boleh jadi akan tergantung dari acara peralihan generasi dan peralihan nilai-nilai yang dikembangkan pada angkatan muda Jepang dan Jerman sekarang ini. Secara pasti, bahasa Jepang dan bahasa Jerman akan lebih perlu dipelajari bagi bagian dunia lainnya.

Meningkatnya peran Jepang dan Jerman makin memaksa Amerika Serikat untuk mengembangkan konsep lama, yakni *trilateralisme* atau sistem *triad*. Menurut konsep ini, tiga kutub utama dunia adalah Amerika Utara, Eropa dan Jepang. Amerika Serikat diharapkan mengutamakan perkembangan di belahan Barat, terutama Amerika Latin; Eropa di bawah kepemimpinan Jerman akan diberi tugas pokok mengawasi perkembangan Asia Barat dan Afrika; sedangkan ka-

wasan Pasifik diserahkan pada kepemimpinan Jepang.

Akan tetapi, perkembangan di Uni Soviet perlu tetap diperhatikan dengan cermat. Benar bahwa dasawarsa 1990-an ini adalah masa-masa yang paling kritis dan menentukan bagi hari depan Uni Soviet (dan keamanan Eropa secara keseluruhan). Apabila perombakan yang diprakarsai Mikhail Gorbachev mulai tahun 1993-1995 menunjukkan hasil-hasil konkret (perbaikan persediaan barang-barang konsumen, peningkatan produktivitas ekonomi, kelancaran dalam sistem distribusi di seluruh wilayah Soviet) ada kemungkinan bahwa ideologi sosialisme akan mendapat angin kedua serta tampil sebagai model pembangunan yang menarik.

Gelombang deregulasi dan swastanisasi di seluruh penjuru dunia sejak awal dasawarsa 1980-an diperkirakan akan mengakibatkan *reaksi balik* pada akhir dasawarsa 1990-an ini. Apa yang sekarang didungungkan sebagai kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal sebenarnya bukanlah kemenangan yang berisi: cukup banyak masalah kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan yang tersisa di Amerika Serikat, Jerman dan Jepang.

Bagi mereka yang disebut sebagai *underclass* dari kapitalisme dan *demokrasi liberal*, semboyan-semboyan tentang kemenangan kapitalisme atas komunisme adalah semboyan-semboyan kosong. Salah satu ilusi tentang *masyarakat informasi* di negara-negara maju adalah kenyataan pahit bahwa informasi hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan sosial-ekonomi untuk memanfaatkan teknologi informasi itu.

Oleh karena itu, kalau pada tahun 1995 sampai tahun 2005 ikhtiar Mikhail Gorba-

chev membuah hasil konkret yang menyentuh bagian terbesar kelas menengah Soviet yang kini sedang tumbuh, besar kemungkinan bahwa ideologi tentang perlunya *tangan negara (interventionism)* akan mengalami kebangkitan. Kekhawatiran akan kemungkinan keberhasilan Gorbachev inilah yang menyebabkan perdebatan seru di Amerika Serikat dan Eropa Barat mengenai patut tidaknya Uni Soviet diberi bantuan keuangan dan ekonomi.

Bagaimanapun juga, kemungkinan bangkitnya "model Soviet" yang baru juga akan berpengaruh luas terhadap keinginan banyak negara-negara sedang berkembang untuk mempercayai peran tangan negara dalam perencanaan dan pembangunan nasional. Kemungkinan itu akan lebih relevan lagi, oleh karena pada dasarnya persaingan ideologi berpangkal pada masalah mengangkat derajat dan martabat manusia yang hidup dalam sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang dianut para pemimpinnya.

Kiranya lebih tepat untuk memperkirakan bahwa pada kurun waktu 25 tahun mendatang, persaingan ideologi dan politik akan terus berlanjut dengan penekanan-penekanan yang turun-naik sekitar produktivitas pemerataan dan keadilan sosial. Jika Amerika Serikat ingin menjadi percontohan bagi pembangunan dan keadilan sosial di Amerika Latin, maka ia pun akan harus memelopori keteladanan dalam mengatasi masalah kualitas hidup dan martabat warga negaranya, terutama yang keturunan Amerika Latin dan kulit hitam. Bila Jerman dan Jepang ingin menjadi percontohan bagi pembangunan dan keadilan sosial di Afrika dan Asia-Pasifik, maka Jerman dan Jepang pun harus memperlakukan *underclass* masing-masing secara lebih mantap.

Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang tengah kita saksikan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan Uni Soviet hendaklah ditinjau pula dari segi pemanfaatan *sistem politik* yang bagaimanakah yang mampu menjawab pertanyaan klasik: menyediakan sarana dan prasarana yang layak dinikmati oleh bagian terbesar rakyatnya, sambil memberi peluang untuk mengembangkan kebebasan dan keadilan.

Di samping itu, ada satu pokok masalah yang kini makin harus dijawab oleh sistem politik apa pun, yakni bagaimanakah mengelola kehidupan sosial-politik masyarakat sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan-nya (termasuk yang melibat keputusan politik tertinggi) lebih menuju penyelamatan dan kelangsungan hidup bumi daripada sekedar mengolahnya untuk kejayaan internasional? Menjadi tanggung jawab kita di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia untuk ikut merumuskan secara internasional apa yang menurut kita adalah cara dan sarana terbaik untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup kita.

Transisi dari pola dua kutub (Amerika-Soviet) menuju pola kutub-ganda telah dimulai sejak 15 tahun lalu. Transisi itu makin kentara sejak akhir 1989 - awal tahun 1990-an. Memantau dan memahami apa yang akan berkembang 15-20 tahun mendatang adalah tugas bersama kita.

Di antara proses globalisasi yang terpenting menuju tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- Sekitar 80% dari semua jenis informasi yang tersimpan dalam 100 juta komputer adalah dalam bahasa Inggris. Bila bahasa Jepang dan bahasa Jerman mulai berperan dalam olah informasi global, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu 15-20

tahun mendatang, pengaruh bahasa Inggris akan menurun secara proporsional.

- Bahasa dunia untuk jangka waktu 15 tahun mendatang masih didominasi oleh bahasa Inggris dan bahasa Inggris-Amerika; pada tahun 2000 sekitar 1,5 milyar manusia akan mahir dalam bahasa ini, sedangkan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 2 milyar orang. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kurun waktu 15-20 tahun mendatang penguasaan bahasa Inggris merupakan salah satu segi akses politik (dalam arti pengaruh media, pendidikan, ilmu, teknologi, bisnis) yang mutlak dikuasai.

- Sejalan dengan proses "pembakuan" yang terjadi ke seluruh penjuru dunia, masalah tarikan-tarikan primordial akan tetap naik ke permukaan: agama, suku, bahasa, kebudayaan, ras dan nasionalisme akan harus diperhitungkan oleh setiap negara dan bangsa besar yang "multinasional."

- Semakin pentingnya hak-hak asasi manusia oleh berbagai kelompok dan tokoh yang ingin menegaskan jati-diri masing-masing di tengah-tengah proses globalisasi dan pembakuan yang cenderung mengkerdilkan arti dan martabat manusia. Setiap sistem politik menghadapi tantangan berat ini.

### Perkembangan Regional: Asia-Pasifik

Kekuatan politik yang terpenting dalam jangka waktu 15-20 tahun mendatang bukanlah Republik Rakyat Cina, Uni Soviet atau Amerika Serikat. Kekuatan politik Jepang mengikuti dan melengkapi kekuatan ekonomi yang tumbuh pesat sejak akhir tahun 1960-an.

Di seluruh kawasan Asia-Pasifik, bahasa Jepang akan semakin penting untuk mulai dipelajari sejak SMTP/SMTA, oleh karena keterkaitan perekonomian seluruh negara di kawasan ini mau tidak mau terpaut erat dengan hampir segala segi dari kegiatan ekonomi dan bisnis Jepang.

Selama dasawarsa 1990-an, di seluruh kawasan Asia-Pasifik akan ditandai oleh bangkitnya generasi baru Asia yang tidak mengenal masa pendudukan Jepang dan tidak terikat secara emosional dengan masa Perang Pasifik. Pada sisi lain, di Jepang sendiri sudah mulai timbul generasi pasca-Perang Dunia II yang lebih percaya diri, lebih matang dan diharapkan lebih kritis dalam memandang dunia sekelilingnya. Dengan kekayaan atas pemilikan asing sebesar US\$400 milyar dan dengan surplus perdagangan yang mencapai rata-rata US\$90 milyar setahun, Jepang tetap akan menjadi kekuatan yang utama di seluruh kawasan ini.

Akan tetapi, berbeda dengan Inggris pada abad ke-19 dan Amerika Serikat pada awal abad ke-20, Jepang tidak memiliki suatu visi ideologis tentang apa dan bagaimana peran politik Jepang menjelang abad ke-21. Landasan falsafah Jepang pada dasarnya adalah suatu pandangan yang merkantilis, dengan ciri-cirinya yang memandang seluruh dunia sebagai lahan usaha.

Sifat merkantilis yang dipadu dengan kebanggaan nasional tentang dirinya sebagai satu-satunya negara industri yang bukan Barat, besar kemungkinan akan memperuncing hubungan-hubungan politiknya dengan negara-negara Asia-Pasifik.

Perasaan bahwa Jepang belum "pantas" atau "matang" untuk menjadi kekuatan politik dunia selamanya akan membuat Jepang harus merumuskan kembali kerjasama poli-

tiknya dengan Republik Rakyat Cina, dengan Korea dan dengan negara-negara ASEAN.

Kebutuhannya akan sumber-sumber alam dari berbagai penjuru dunia, terutama dari kawasan Asia-Pasifik, selamanya akan memperkuat nalurnya untuk merebut pasaran atau menguasai sumber alam melalui berbagai cara yang menegaskan keunggulannya: penanaman modal, perdagangan, perbankan dan bantuan resmi. Suatu jaringan mata rantai yang mempersatukan kelangsungan hidup perekonomian Jepang dengan seluruh kawasan dunia yang potensial, merupakan ciri-ciri politik luar negerinya selama tahun-tahun 1990 dan awal tahun 2000. Pola hubungan internasional Asia-Pasifik selama kurun waktu 20 tahun mendatang akan didominasi oleh Jepang sedemikian rupa sehingga tak satu pun kebijaksanaan dalam dan luar negeri negara Pasifik yang tidak terpengaruh oleh perkembangan politik, sosial dan ekonomi di Jepang.

Karena itu, suatu studi yang mendalam dan berkelanjutan tentang seluruh seluk-beluk kehidupan Jepang sebagai negara, sebagai bangsa dan sebagai budaya adalah suatu keharusan bagi kegiatan ilmiah universitas-universitas di kawasan ini.

Pertanyaan yang segera timbul ialah apakah yang akan melandasi hubungan internasional Jepang dengan kawasan Asia-Pasifik? Selang 10-15 tahun terakhir ini, kesan kuat yang timbul di Asia Tenggara adalah Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang haus akan sumber alam, yang rakus meraih lahan pemasaran dan yang pandai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkuat daya saing internasional.

Akan tetapi, perubahan-perubahan sosiologis dan demografis di Jepang selama

dasawarsa 1990-an diharapkan akan mengubah cara bangsa Jepang memandang dunia dan memandang diri mereka sendiri. Sekitar 8 juta orang Jepang setiap tahun berwisata ke luar negeri, bagian terbesar di antaranya adalah generasi muda usia (kelompok umur 25-35 tahun) yang lebih mengetahui keadaan dunia luar.

Generasi muda Jepang ini diperkirakan akan lebih santai dan lebih mementingkan kualitas kehidupan di negerinya sendiri. Lagipula, sekitar 30% dari penduduk Jepang menjelang tahun 2000 akan tergolong dalam kelompok usia di atas 65 tahun, sehingga meningkatkan peran dan pembiayaan pemerintah untuk menjamin hari tua mereka. Tangan negara di bidang jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan usia lanjut diharapkan akan menampilkan wajah Jepang yang lebih manusiawi. Suatu komisi yang dibentuk di bawah kantor perdana menteri Jepang pada akhir 1989 lalu diberi tugas untuk merumuskan peran internasional Jepang pada abad ke-21. Keberhasilan perumusan peran Jepang itu untuk sebagian tergantung dari kemauan politik negara-negara Asia-Pasifik lainnya.

Apabila Jepang harus merumuskan peran politiknya setelah meraih kedudukan di bidang ekonomi, maka Republik Rakyat Cina adalah negara kawasan Pasifik yang harus bergumul dengan persatuan politik dan pembangunan ekonomi. RRC sampai dengan pertengahan dasawarsa 1990-an akan dipimpin oleh "generasi Yanan," generasi yang sejak 1926 mengupayakan persatuan negeri Cina melalui peperangan, perang saudara dan pembendungan oleh negara-negara Barat.

Regenerasi di RRC akan terjadi pada tahun 1991-1992 sehingga negeri besar itu kelak untuk pertama kali akan dipimpin

oleh "generasi kedua" yang lebih teknokratis, serta lebih mementingkan keahlian daripada kemurnian ideologi. Dalam pada itu, persoalan dalam negeri RRC adalah demikian rumit, berat dan luas sehingga untuk kurun waktu 1990-2010 mendatang perhatian para pemimpinnya akan terpusat pada pembangunan dalam negeri.

RRC akan lebih sulit untuk menampilkan diri sebagai percontohan dari kisah pembangunan yang berhasil. Menjelang awal 1990-an, berbagai kemacetan di bidang industri, pembangunan prasarana pedesaan dan ketimpangan antara pusat industri dengan pedalaman yang terbelakang telah mengguncangkan sendi-sendi sosial-politik RRC. Tekanan kependudukan yang dialaminya dan luas wilayahnya mau tidak mau akan menyulitkan usaha-usaha pelebagaan yang diperlukannya di berbagai sektor kehidupan. Lepas dari pilihan ideologi, cara penanganan masyarakat Cina akan diwarnai oleh naluri sentralisme yang kuat. Korban-korban upaya pembangunan akan dengan lebih mudah dibenarkan atas nama persatuan dan kesatuan nasional.

Dampak dari meningkatnya kekuatan ekonomi dan politik Jepang serta bertahannya RRC sebagai salah satu pusat politik dan budaya di Asia akan makin dirasakan di Asia Tenggara, khususnya di ASEAN.

Pada tahun 1990-an dan awal 2000, ciri-ciri pengintegrasian kepentingan Jepang di seluruh Asia Tenggara semakin ditandai oleh pembagian kerja yang lebih terencana antara investasi, perdagangan dan bantuan luar negeri. Sedemikian kuatnya pengaruh politik Jepang di ASEAN sehingga proyek-proyek ASEAN yang berskala besar hanya mungkin terlaksana berkat adanya komitmen dana dari Jepang. Pada gilirannya, komitmen dana itu mencerminkan kepentingan dirinya sendiri sehingga ketegangan antara

"idealisme" dan "realisme" uluran tangan Jepang semakin dipersoalkan.

Lagi pula, kemajuan-kemajuan dalam bidang transaksi internasional dewasa ini telah melangkahi pentingnya konsep regionalisme. Besarnya bobot kehadiran teknologi dan modal Jepang telah mengakibatkan suatu proses "de-ASEANisasi," mengingat hubungan ekonomi dan perdagangan Jepang-ASEAN jauh lebih besar daripada hubungan intra-ASEAN.

Meskipun tidak dapat menyamai peran yang dimainkan Jepang, RRC tetap merupakan negara besar utama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pusat politik dan budaya, perkembangan di RRC cepat atau lambat mempengaruhi iklim politik di setiap negara ASEAN, istimewa yang memiliki masalah hubungan antara golongan pribumi dan non-pribumi.

Terhadap Jepang, RRC dapat merupakan mitra politik yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengajukan dan memperoleh syarat-syarat kerjasama ekonomi yang lebih baik. Pada sisi lain, cara RRC memandang Asia Tenggara juga akan ditentukan oleh bagaimana masing-masing negara Asia Tenggara mengatasi dan memantapkan hubungan antara golongan pribumi dan non-pribumi. Kesepakatan untuk tidak ikut campur tangan ke dalam urusan negara-negara ASEAN adalah bukti bahwa kalau kepentingan nasional menuntut sikap tertentu, para pemimpin RRC cukup kenyal untuk mengalah.

### **Dampak terhadap Pembangunan Nasional Indonesia**

Sekalian gambaran kecenderungan internasional dan regional selama 20-25 tahun

mendatang tadi akan menantang kita dengan sejumlah permasalahan pokok, khususnya yang melibat pengembangan kualitas hidup politik dan peningkatan martabat manusia Indonesia.

Pertama dan yang terpenting ialah tekad bahwa dalam dunia yang kompetitif, perhatian pada pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional kita harus tetap kuat. Daya tarik kebudayaan, teknologi dan gaya hidup dari negara-negara lain akan berdampak secara berbeda di masing-masing wilayah dan propinsi di seluruh penjuru Tanah Air.

Karena itu, adalah mutlak untuk mempelajari dengan seksama "tarikan-tarikan sosial-budaya" yang mengena pada beberapa wilayah perbatasan kita, istimewa di Irian Jaya-Papua Niu Gini, Sulawesi Utara-Filipina bagian selatan, Sumatera Utara/Aceh dengan Malaysia serta Timor Timur.

Ini berarti bahwa dalam pendidikan politik kita secara nasional menyeluruh, makin penting dikembangkan dua jenis kesadaran akan kehidupan politik nasional. Yang pertama ialah pemantapan identitas Indonesia sebagai konsep *geo-politik/teritorial*, yakni integrasi klasik yang mempersatukan seluruh wilayah tumpah darah sebagai bagian yang tak terpisahkan. Wawasan Nusantara adalah sikap dasar yang terus-menerus perlu dikongkretkan melalui rangkaian keberhasilan pelebagaan sosial-politik, terutama pelebagaan yang didasarkan pada sendi-sendi *keorganisasian* yang kuat.

Yang kedua ialah pemantapan kemampuan fungsional manusia Indonesia, yakni pengembangan pengetahuan, ilmu dan kiat manusia sebagai makhluk yang harus bertarung dalam dunia yang sarat dengan daya saing internasional. Profesionalisme di berbagai bidang usaha dan lapangan pekerjaan

menuntut dicapainya tingkat kemahiran dan kesigapan tertentu. Internasionalisasi dan transnasionalisasi aneka ragam sektor keahlian dan jabatan harus dikuasai oleh sebanyak mungkin tenaga-tenaga Indonesia, apabila tantangan dan peluang internasional ingin ditangani dengan baik.

Kedua jenis pemantapan selama 20-25 tahun mendatang ini adalah tugas dari sekalian jenjang pendidikan di seluruh pelosok Tanah Air kita. Dengan perkataan lain, kita semua dituntut untuk menumbuhkan diri kita sebagai *bangsa niaga* di samping memelihara kemampuan kita sebagai *bangsa siaga*. Kesadaran kita akan makna *geo-politik/teritorial* akan mempertegas komitmen kita semua untuk memelihara persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kesadaran dan pekerjaan kita menyiapkan manusia-manusia fungsional akan mempertegas komitmen kita bahwa syarat-syarat dan cara-cara memelihara persatuan dan kesatuan nasional itu tergantung dari seberapa cepat dan tanggap kita memberi kesempatan yang memadai bagi semua putra-putri Indonesia dari sebanyak mungkin wilayah teritorial Indonesia. Dengan demikian, orang Indonesia dari Irian Jaya yang bekerja di pertambangan tembaga akan tetap merasakan manfaat serta kepentingannya untuk mempertahankan ke-Indonesia-annya. Demikian pula putra-putri di Aceh akan merasakan bahwa lahan industri dan investasi di sekitar wilayahnya itu pun dimanfaatkan oleh sebesar jumlah rakyat Indonesia di seluruh penjuru Tanah Air.

Ikhtiar memelihara persatuan dan kesatuan nasional di tengah-tengah tarik-menarik internasional dan primordial boleh jadi akan semakin berat pada kurun waktu 1990-an ke atas. Sekarang pun sudah dirasakan bahwa "tangan negara" di berbagai pe-

losok Tanah Air perlu didefinisikan kembali: seberapa kendali pusat yang optimal guna menumbuhkan otonomi yang berbobot. Sebaliknya, tingkat otonomi yang seberapa yang patut dilimpahkan agar daya-tarik budaya luar negeri tidak mengundang perpecahan bangsa dan negara?

Perhatian yang diarahkan pada perkembangan Indonesia Bagian Timur melibatkan ikhtiar-ikhtiar agar kualitas manusia Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sekalian keahlian fungsional (akuntansi, manajemen, teknologi, sosial-budaya) dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga rotasi dan sirkulasi warga negara Indonesia dari satu ujung ke ujung lain dapat terlaksana dengan lancar. Wawasan nasional mempertegas identitas dan keterikatan nasional; wawasan internasional memperkokoh pentingnya penguasaan ilmu, teknologi dan pengetahuan yang bersifat lintas-benua.

Generasi muda Indonesia yang mekar dan tumbuh selama jangka waktu 15-20

tahun mendatang selamanya harus dibekali dengan suatu pemetaan geografik maupun fungsional tentang kedudukan Indonesia di tengah-tengah perubahan dunia. Kepada mereka dituntut kemampuan untuk memahami bahwa persaingan politik internasional semakin ditandai oleh kesanggupan kita melakukan *brain-power planning* guna menunjang dan mendukung *manpower planning*.

Dalam pada itu, ikhtiar memantapkan kehidupan sosial-politik dalam negeri memerlukan persiapan, perencanaan dan penjabaran berfungsinya aneka jenis lembaga-lembaga yang memungkinkan sekalian tantangan perubahan itu diresapi dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang seprofesi atau sepenanggungan. Hanya dengan demikianlah kita dapat menjaring lapisan sosial-politik terendah yang memerlukan pertolongan tangan negara. Dan hanya dengan demikianlah kelompok pemimpin kita di atas, yang seharusnya mengikuti dan merencanakan kekenyalan dalam menetapkan kebijakan umum, akan mampu mempertahankan daya saing internasional kita.

## DAFTAR PUSTAKA

Drucker, Peter. *The New Realities*. Harper & Row, 1989.

Naisbitt, John dan Aburdene, Patricia. *Megatrends 2000*. William Morrow, 1990.

Porter, Michael. *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press, 1990.

"Prospects for the 1990s," *South*, January 1990.

"Money Can't Buy You Wealth," *South*, June 1990.

"Managing the Environment," *Scientific American*, September 1989 (Special Issue).

*Asia Yearbook 1990*.

*Atlas of the World*. London: Economist, 1990.

*Economist*, double issue, 23 December 1989 - 4 January 1990.

## Lampiran

**DAFTAR PERINGKAT PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT UNDP**  
(Human Development Report 1990)

	Peringkat HDI		Perbedaan
	A	B	
Jepang	130	126	naik 4
Swedia	129	125	naik 4
Finlandia	120	121	turun 5
Amerika Serikat	112	129	turun 17
Uni Soviet	105	101	naik 4
Singapura	96	110	turun 14
Malaysia	85	80	naik 5
Thailand	78	55	naik 23
Indonesia	54	41	naik 13
Benin	10	28	turun 18
Somalia	7	23	turun 16
Berkina Faso	3	13	turun 10

HDI = Human Development Index mencakup harapan usia hidup; akses pada pendidikan; kemungkinan mencapai taraf hidup yang layak bagi manusia. Ketiga unsur tadi dipadukan menjadi satu indeks menyeluruh.

PDB Per Kapita = pengukuran kemajuan konvensional.

Perbedaan = menunjukkan naik turunnya peringkat bila disusun atas dasar HDI daripada atas dasar PDB per kapita.

(Tidak dijelaskan apakah harapan mencapai usia lanjut dan sehat mencakup keselamatan fisik hidup dalam sistem politik tertentu. J.S.)